

## Ketersediaan dan Keterjangkauan Sekolah Menengah Bagi Masyarakat Lokal di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Masyhuri\*, Suud, Muhammad Ilyas, Jepri Utomo, Mila Noviana, Zilly Arsyika Masyhuri

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Pendidikan IPS, Universitas Mataram,

Jl. Majapahit No. 62, Mataram NTB, 83125, Indonesia

\*Corresponding Author: [masyhurifkip@gmail.com](mailto:masyhurifkip@gmail.com)

### Article History

Received : September 13<sup>th</sup>, 2025

Revised : October 27<sup>th</sup>, 2025

Accepted : November 10<sup>th</sup>, 2025

**Abstract:** Penelitian ini mengkaji aksesibilitas fisik sekolah menengah (SMP, SMA/MA, SMK) bagi masyarakat lokal di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika fokus studi: Desa Kute, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Tujuan penelitian adalah (1) memetakan ketersediaan fasilitas pendidikan menengah di wilayah studi, (2) mengukur aksesibilitas fisik (jarak tempuh, waktu tempuh, sarana transportasi, kondisi jalan, dan hambatan infrastruktur), dan (3) mengidentifikasi kelompok penduduk yang mengalami kesulitan akses. Metode yang dipakai adalah survei lapangan, wawancara semi terstruktur dengan pemangku kepentingan, observasi fasilitas, dan analisis spasial sederhana (buffer radius 5–10 km). Hasil menunjukkan bahwa meskipun jumlah gedung sekolah menengah relatif memadai secara kuantitatif, terdapat kesenjangan aksesibilitas untuk masyarakat lokal yang tinggal di wilayah pesisir dan juga perbukitan yang disebabkan keterbatasan transportasi, kondisi jalan, dan kapasitas ruang kelas. Rekomendasi meliputi pengembangan layanan transportasi sekolah berbasis komunitas, penambahan unit ruang kelas di titik bottleneck, serta penguatan program SMK vokasi yang responsif kebutuhan KEK.

**Keywords:** Aksesibilitas Fisik, Sekolah Menengah, Masyarakat Lokal, KEK Mandalika

## PENDAHULUAN

Sejarah lahirnya kawasan strategis Indonesia dimulai pada tahun 1970 dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), juga dikenal sebagai Free Trade Zone (FTZ). Pada tahun 1972, Indonesia juga mulai merancang Kawasan Berikat (Bonded Warehouse Zones). Kawasan Industri didirikan pada tahun 1989, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) didirikan pada tahun 1996, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) didirikan pada tahun 2009. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan lokasi geografis tertentu diberlakukan secara khusus terkait dengan peraturan pajak, bea cukai, imigrasi, perizinan, dan ketenagakerjaan (Ardana et al., 2020; Septadiani et al., 2022). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika merupakan salah satu dari lima Destinasi Super Prioritas (DSP) di seluruh Indonesia (Candi Borobudur di Magelang Jawa Tengah, Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi

Utara).

Mandalika ditetapkan sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Luas area KEK Mandalika adalah 1.035,67 hektar dan menghadap Samudera Hindia. Konsep pembangun KEK Mandalika adalah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal dan pariwisata berwawasan lingkungan (Permadi et al., 2023). Pembangunan KEK Mandalika tentunya membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Peluang tersebut bahkan telah diatur dalam Peraturan Daerah NTB yang mengharuskan investor yang masuk menggunakan 70 persen tenaga kerja lokal NTB. Namun demikian, serapan tenaga kerja lokal NTB di KEK Mandalika baru 40 persen (Bisnis.com, MATARAM, 2024). Rendahnya serapan tenaga kerja lokal di KEK Mandalika dikarenakan kualitas SDM yang belum memenuhi standar untuk bidang pekerjaan tertentu. SDM yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh Tingkat pendidikan setiap orang serta kesesuaian keahlian dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Menurut hasil survey oleh Indonesian

National Assessment Program pada tahun 2022 bahwa angka putus sekolah SMP di Lombok Tengah menempati posisi tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain dari pada itu, rerata skor kemampuan siswa Sekolah Dasar di Lombok Tengah untuk bidang matematika (444), kemampuan literasi (425) dan kemampuan sains (429). Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa Sekolah Dasar masih di bawah skor rerata nasional yaitu 500 (Marswandi et al., 2024). Oleh karena itu, masyarakat lokal harus dipersiapkan untuk dapat memenuhi standar yang diperlukan, terutama terkait dengan standar pendidikan formal. Berbagai lapangan pekerjaan yang tersedia di KEK Mandalika mempersyaratkan standar minimal pendidikan formal, yaitu Sekolah Menengah, yang meliputi: Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). Oleh karena itu, aksesibilitas Sekolah Menengah bagi masyarakat lokal menjadi keniscayaan untuk dapat mengisi lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mereka tidak menjadi penonton di wilayahnya sendiri, melainkan dapat merasakan dampak positif pembangunan KEK Mandalika dengan memperoleh pekerjaan yang layak (Suryade et al., 2022).

Salah satu aspek penting yang terkait dengan aksesibilitas sekolah menengah adalah aksesibilitas fisik. Hal ini tentu tidak sekedar terkait dengan ketersediaan bangunan sekolah, melainkan juga keterjangkauan, yakni terkait dengan jarak dan waktu tempuh, kondisi jalan, serta ketersediaan transportasi (Fathimah & Apsari, 2020). Berbaagi aspek tersebut akan mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah dari kalangan masyarakat lokal yang tinggal di kawasan KEK Mandalika, khususnya Desa Kute. Oleh karena itulah penelitian ini sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk memetakan ketersediaan dan keterjangkauan sekolah menengah (SMP/MTs, SMA/MA, SMK) di Desa Kute.

## METODE

Jenis Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

(Hadi et al., 2021; Sugiyono, 2020). Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti dengan maksud mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan terkait aksesibilitas fisik sekolah menengah bagi Masyarakat lokal di KEK Mandalika. Penelitian dilaksanakan di Desa Kute Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Batar (NTB), Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, obserasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan informan penelitian yaitu Kepala Desa, kepala kewilayahan di dusun yang menjadi sampel Lokasi, kepala SMA Sederajat di Kecamatan Pujut, orang tua yang memiliki anak usia sekolah menengah. Data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diamati (diobservasi), dan dikaitkan dengan data dokumen. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis data interaktif yang melibatkan empat hal utama, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Analisis keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kuta merupakan salah satu desa di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Posisi geografis Desa Kuta yaitu bagian utara berbatasan dengan Desa Rambitan, bagian timur berbatasan dengan Desa Mertak, bagian barat berbatasan dengan Desa Prabu, dan bagian selatan langsung menghadap Kawasan Pantai Mandalika dan Samudra Hindia. Luas wilayah Desa Kuta yaitu 23,66 km<sup>2</sup> (2.366 ha). Desa ini terdiri dari 14 dusun, meliputi: (1) Dusun Lenser, (2) Dusun Mong, (3) Dusun Emate, (4) Dusun Mong Lauk, (5) Dusun Merendeng, (6) Dusun Mengalung, (7) Dusun Batu Riti, (8) Dusun Kuta, (9) Dusun Ketapang, (10) Dusun Sekar Kuning, (11) Dusun Rangkep, (12) Dusun Ngolang, (13) Dusun Ujung Lauk, (14) Dusun Ebunut. Desa Kuta menjadi pusat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berkembang pesat. Akses menuju desa ini cukup mudah karena berada sekitar 17 km dari Bandara Internasional Lombok dan 50 km dari Kota Mataram. Pembangunan KEK Mandalika telah mengakibatkan perubahan demografis yang signifikan, terutama dengan adanya relokasi

penduduk dari Dusun Ujung Lauk dan Dusun Ebnut akibat pembangunan Sirkuit Mandalika. Kedua dusun ini sebelumnya berada di kawasan yang kini menjadi area strategis untuk pengembangan fasilitas olahraga motorsport internasional.

Relokasi penduduk Desa Kuta tentunya tidak hanya mengubah peta pemukiman masyarakat, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam akses terhadap fasilitas pendidikan yang sebelumnya sudah terbatas. Masyarakat Dusun Ujung Lauk dan Dusun Ebnut yang direlokasi, kini harus menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggal baru, yang memiliki karakteristik geografis dan aksesibilitas yang berbeda. Jumlah penduduk Desa Kuta mencapai 9.560 jiwa. Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar SMA atau SMK. Jenis pekerjaan dan penghasilan penduduk sangat bervariasi. Seiring dengan berkembangnya KEK Mandalika, ada yang bekerja di sektor pariwisata, seperti pemilik homestay, penyewaan kendaraan, ataupun jasa pemandu wisata. Mereka yang bekerja di sektor ini umumnya memiliki penghasilan yang cukup stabil. Namun di sisi lain, ada juga yang bekerja di sektor tradisional seperti petani, buruh

bangunan, nelayan, dan penenun dengan penghasilan fluktuatif. Penduduk Desa Kuta mayoritas Suku Sasak dan beragama Islam. Infrastruktur jalan di Desa Kuta saat ini telah mengalami peningkatan signifikan, khususnya sejak ditetapkannya kawasan ini sebagai bagian dari KEK Mandalika. Namun demikian, moda transportasi umum yang tersedia masih terbatas. Warga umumnya menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, sebagai alat transportasi utama untuk beraktivitas sehari-hari, termasuk antar jemput anak sekolah. Selain itu, beberapa keluarga yang tidak memiliki kendaraan pribadi mengandalkan kendaraan sewa atau jasa ojek, baik konvensional maupun online. Sayangnya, layanan transportasi ini belum terorganisir secara resmi dan tidak tersedia di seluruh dusun, sehingga akses menuju sekolah, terutama bagi siswa dari dusun terpencil, masih menjadi tantangan tersendiri.

### **Ketersediaan Sekolah Menengah Bagi Masyarakat Lokal di Desa Kuta**

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua sekolah menengah yang berlokasi di Desa Kuta sebagaimana disajikan dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1.** Sekolah Menengah yang Berlokasi di Desa Kuta.

<b>Jenjang</b>	<b>Nama Sekolah</b>	<b>Status</b>	<b>Alamat</b>
SMP	SMP Islam Al-Ma'arif NW Kuta	Swasta	Rangkap II, Desa Kuta Kecamatan Pujut
SMK	SMKS Darul Abror Kuta	Swasta	Bypass Kuta-Awang Km.3 Kuta, Desa Kuta Kecamatan Pujut.

Keberadaan sekolah menengah memang tidak banyak yang berlokasi langsung di Desa Kuta, namun banyak berada di desa-desa tetangga, seperti Desa Sengkol, Desa Kawo, Desa Sukadana, Desa Gerupuk, dan sebagainya. Namun demikian, masih menjadi tantangan tersendiri bagi penduduk Desa Kuta, khususnya yang berada di Dusun Ujung Lauk dan Dusun Ebnut yang telah mengalami relokasi.

### **Keterjangkauan Sekolah Menengah Bagi Masyarakat Lokal di Desa Kuta**

Keterjangkauan merupakan salah satu bagian sangat penting yang mempengaruhi aksesibilitas sekolah menengah bagi masyarakat lokal di Kawasan KEK Mandalika, khususnya masyarakat Desa Kuta. Dalam hal ini, terdapat beberapa aspek yang terkait dengan keterjangkauan, meliputi; (1) aspek geografis/fisik, (2) aspek ekonomi, (3) aspek sosial budaya, (4) aspek kebijakan dan layanan,

(5) aspek kualitas pelayanan. Faktor geografis merupakan salah satu tantangan utama yang mempengaruhi aksesibilitas sekolah menengah di kawasan KEK Mandalika. Jarak tempuh dari berbagai Dusun khususnya Dusun Ebnut dan Ujung Lauk ke sekolah menengah seperti SMPN 1 Pujut dan SMA Negeri 1 Pujut bervariasi antara 20 menit hingga 1 jam perjalanan. Kondisi ini menciptakan beban waktu yang cukup signifikan bagi siswa, di mana mereka harus memulai perjalanan pada pukul 06.00 Wita agar dapat tiba di sekolah sebelum pukul 07.00 Wita. Jarak tempuh tersebut menjadi kendala yang nyata bagi siswa yang berasal dari Desa Kuta, khususnya dari dusun Ebnut dan Ujung Lauk (Maharani et al., 2023).

Selain itu, keterbatasan sarana transportasi publik juga menjadi tantangan serius yang mempengaruhi aksesibilitas geografis. Tidak tersedianya angkutan umum yang memadai memaksa siswa untuk

mengandalkan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor. Situasi ini menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk pelanggaran hukum karena banyak siswa yang menggunakan sepeda motor meskipun masih di bawah umur. Ketergantungan pada antar jemput keluarga juga menjadi beban tambahan yang tidak ringan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Dalam perspektif HAM, pemerintah dan pihak terkait memiliki tanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas fisik ke pendidikan yang aman dan terjangkau bagi semua anak, termasuk penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai. Meskipun infrastruktur jalan menuju sekolah sudah mengalami perbaikan berkat pengembangan kawasan Mandalika, tidak adanya transportasi umum atau kendaraan sekolah tetap menjadi hambatan akses fisik yang signifikan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di Desa Kuta, juga menjadi faktor determinan dalam aksesibilitas pendidikan menengah. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan karakteristik pekerjaan yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Profesi yang dominan meliputi penenun, petani, buruh bangunan, dan ibu rumah tangga, dengan pendapatan yang sangat tergantung pada musim atau ketersediaan proyek (Maharani et al., 2023). Seperti yang dialami responden berinisial “N” yang bekerja sebagai penenun sekaligus bertani untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, sementara responden berinisial “J” dan “S” yang bekerja sebagai buruh bangunan mengandalkan proyek harian yang tidak selalu tersedia. Ketidakpastian ekonomi ini menyebabkan pembiayaan pendidikan seringkali dilakukan secara bertahap atau bahkan mengalami penundaan, seperti yang dialami oleh keluarga berinisial “MrTs”. Meskipun sekolah telah menghilangkan biaya SPP dan buku sebagai langkah positif dalam menjamin aksesibilitas ekonomi, serta memberikan bantuan melalui Program Indonesia Pintar dan alokasi dana BOS bagi siswa kurang mampu, masih terdapat biaya-biaya tidak langsung yang menjadi beban bagi keluarga. Biaya transportasi, seragam selain seragam olahraga yang dibantu, dan perlengkapan sekolah lainnya tetap menjadi potensi penghalang bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

Minimnya akses terhadap bantuan pendidikan dari pemerintah menjadi hambatan struktural yang serius dalam menjamin

aksesibilitas pendidikan menengah. Bantuan beasiswa dari pemerintah, baik berupa Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum merata. Terdapat responden yang mengaku tidak mendapat bantuan pemerintah, baik PIP maupun KIP, dan juga responden yang mengaku pernah mendapat bantuan KIP, namun penggunaannya tetap terbatas karena tidak mencakupi seluruh kebutuhan pendidikan. Sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan siswa baru menciptakan dinamika kompleks dalam aksesibilitas pendidikan. Isu zonasi yang membatasi minat tinggi masyarakat Desa Kuta untuk bersekolah di SMPN 1 Pujut dan mengarahkan mereka ke SMPN 9 menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efektivitas sistem ini dalam menjamin hak atas pendidikan yang merata bagi semua masyarakat lokal di kawasan KEK Mandalika, termasuk masyarakat Desa Kuta.

Bagi masyarakat Desa Kuta, sekolah di kota dinilai lebih menarik, karena fasilitas dan pergaulan yang lebih luas. Kebijakan zonasi yang tidak tepat dapat menciptakan ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah, serta mempengaruhi distribusi siswa yang tidak merata di berbagai sekolah di kawasan tersebut (Widyastuti, 2020). Selanjutnya, aspek kultural masyarakat lokal juga memberikan pengaruh signifikan terhadap aksesibilitas dan keberlanjutan pendidikan menengah. Tidak adanya peraturan atau kewajiban pendidikan minimal dari tingkat keluarga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Semua informan dalam penelitian menyatakan bahwa tidak ada aturan khusus dalam keluarga yang mengharuskan anak menyelesaikan pendidikan sampai jenjang tertentu. Kondisi ini menunjukkan lemahnya budaya pendidikan formal di tingkat masyarakat.

## KESIMPULAN

Aksesibilitas pendidikan menengah bagi masyarakat lokal di kawasan KEK Mandalika, khususnya Desa Kuta masih belum sepenuhnya merata. Meskipun lembaga pendidikan menengah telah tersedia di Desa Kuta, kenyataannya tidak semua anak-anak usia sekolah menengah dapat menikmati pendidikan dengan mudah. Faktor geografis seperti jarak tempuh yang jauh, minimnya transportasi

umum, dan pembatasan zonasi sekolah menjadi hambatan. Selain itu, keterbatasan ekonomi keluarga juga menjadi alasan utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan. Bantuan pemerintah berupa KIP atau PIP belum menjangkau semua warga yang membutuhkan, baik karena keterbatasan informasi maupun proses pengajuan yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Selain itu, masih rendahnya tingkat pendidikan orang tua berpengaruh terhadap minimnya dorongan kepada anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Walaupun begitu, kondisi sosial masyarakat secara umum cukup kondusif, dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang baik. Nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan penghormatan terhadap adat masih dijaga, namun peran budaya dalam mendorong semangat pendidikan perlu lebih dikuatkan agar menjadi bagian dari kultur masyarakat. Kepada Pemerintah daerah dan Desa Kuta disarankan agar mengupayakan penyediaan transportasi sekolah atau subsidi biaya transportasi agar anak-anak di dusun terpencil tidak kesulitan berangkat ke sekolah, sosialisasi bantuan pendidikan seperti KIP dan PIP disarankan agar ditingkatkan, termasuk pendampingan dalam proses pengajuan agar keluarga miskin benar-benar terbantu.

## REFERENSI

Andrew & Orodho (2014). Socio-Economic Factors Influencing Pupils' Access to Education in Informal Settlements: a Case of Kibera, Nairobi Country, Kenya. *International Journal of Education and Research*, 2(3), hlm. 1-16.

Ardana, I. G. L., Wahyunadi, Karismawan, P., Manan, A., & Mustain (2020). Kesiapan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Untuk Berkontribusi Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 6(2), 102–113.  
<https://doi.org/10.29303/ekonobis.v6i2.50>

BPS Kabupaten Lombok Tengah (2016). Kecamatan Pujut dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik.  
<https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/publication/2016/07/29/7184e74680f0f82fdea84013/kecamatan-pujut-dalam-angka-2016.html>

Budhiana, N. (2012). *Mandalika Belum Penuhi Amdal KEK*. Antara Bali.

CIIP. (2017). *Special Economic Zones: An Operational Review of Their Impact*. The World Bank Group. Washington DC.  
<https://documents1.worldbank.org/curated/pt/316931512640011812/pdf/P154708-12-07-2017-1512640006382.pdf>

CNN Indonesia (2017). *KEK Mandalika Lombok Diresmikan Presiden Jokowi*. CNN Indonesia.  
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20171021172229-307-249981/kek-mandalika-lombok-diresmikan-presiden-jokowi>

Dewan Nasional KEK. (t.thn.). Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia.  
<https://kek.go.id/id/about>

Fathimah, K., & Apsari, N. C. (2020). Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Fasilitas Pelayanan Publik Ditinjau Dari Activity Daily Living. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 120.  
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29121>

Hadi, A., Asrori, & Rusman (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi. Biografi*. CV. Pena Persada.  
<https://bali.antaraneews.com/berita/27552/mandalika-belum-penuhi-amdal-kek>

Humas Ekon (2024). *Pemerintah Resmi Tetapkan KEK Tanjung Sauh*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  
<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pemerintah-resmi-tetapkan-kek-tanjung-sauh>

ITDC (2018). *Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (RPMA) Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project*. Asian Investment Infrastructure Bank.

Kainuwa & Najeemah (2013). Influence of Socio-Economic and Educational Background of Parents on Their Children's Education in Nigeria. *International Journal of Scientific and Research Publication*. (3), hlm. 1-8.

Kemenparekraf (2024). *Bau Nyale, Storynomic Tourism Melegenda dari Mandalika*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- <https://kemenparekraf.go.id/berita/bau-nyale-storynomics-tourism-melegenda-dari-mandalika>
- Maharani, T., Wijayanti, I., & Rahmawati, R. (2023). Perubahan Pola Aktivitas Masyarakat Terdampak Pembangunan Sirkuit Mandalika (Studi di Dusun Ebunut Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah). *Universitas Mataram*, 4, 450–473.
- Marswandi, E. D. P., Ihyani, L., Marlina, F. N., & Suhaeril, S. (2024). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kepuasan Wisatawan: Studi Kuantitatif di KEK Mandalika. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 10(4), 601–608. <https://doi.org/10.29303/jseh.v10i4.679>
- Miles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Sage Publications.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029. Diakses pada 2024 dari [https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk\\_hukum/Perda%20No.%203%20Tahun%202010.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Perda%20No.%203%20Tahun%202010.pdf)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Diakses pada 2024 dari <https://www.peraturan.go.id/id/pp-no-50-tahun-2011>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Diakses 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5491/p-p-no-52-tahun-2014>
- Permadi, L. A., Tara, N. A. A., & Septiani, E. (2023). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Terintegrasi di Lingkar KEK Mandalika. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 9(4), 447–456. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.436>
- Sekretariat Dewan Nasional KEK. (2011). Laporan Kegiatan Tahun 2011 Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://kek.go.id/id/service/report>
- Septadiani, W. P., Pribadi, O. S. I. ., & Rosnarti, D. (2022). Peran Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Universitas Trisakti. WIDYA PUTRI SEPTADIANI*, 22–31.
- Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sunesti, Y. (2023). Kelompok Rentan dalam Pembangunan Inklusif: Studi Perempuan Kepala Keluarga di Nusa Tenggara Barat. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(2), 171–176. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/107>
- Suryade, L., Fauzi, A., Achsani, N. A., & Anggraini, E. (2022). Variabel-Variabel Kunci dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK) Berkelanjutan Di Mandalika, Lombok Tengah, Indonesia. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 6(1), 16–30. <https://doi.org/10.34013/jk.v6i1.327>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diakses 2024 dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Diakses pada 2024 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/54483/uu-no-39-tahun-2009>
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek: Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, 7(1), 11–19. <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>
- Zheng, D. Z. (2021). *The Dos and Don'ts of Special Economic Zones*. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Washington DC. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/700061638779538611/pdf/The-Dos-and-Don-ts-of-Special-Economic-Zones.pdf>